BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu disusun rencana jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Peundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. (Berita Daerah Kabupaten Siak tahun 2021 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) Tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) Tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
11. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
12. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
13. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
14. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
15. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang bersifat indikatif.
(2) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi.
(3) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
   b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
   c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
   d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN ARAH KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
   e. BAB V : PENUTUP

(2) Penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4

(1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029; dan
c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STARTEGIS

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
(2) Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

(1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 30

Pemerintah Kabupaten Siak
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 –2029

(Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis)



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis (Renstra) dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025- 2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang hendak dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak pada periode 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bias berjalan sesuai srencana kerja.

Siak Sri Indrapura, Januari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN SIAK,

SETYA HENDRO WARDHANA, SE.SH,MM
NIP. 19720606 199703 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 6
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 6
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 27
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah 27
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 28
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.2.2. Isu Strategis 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33
3.1 Tujuan 33
3.2 Sasaran 34
3.3 Strategi Perangkat Daerah 38
3.3 Arah Kebijakan 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 41
4.1 Program 41
4.2 Kegiatan 41
4.3 Sub Kegiatan 42
4.4 Rencana Pendanaan 56
4.5 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah 73
4.6 Indikator Kinerja Utama 75
4.7 Indikator Kinerja Kunci 76
BAB V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak berdasarkan..... 15
Tabel 2.2 SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan berdasarkan Jabatan Tahun 2025..... 16
Tabel 2.3 Klasifikasi PNS dan PPPK di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan pendidikan tahun 2025..... 16
Tabel 2.4 Klasifikasi PNS dan PPPK dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak berdasarkan pangkat/gol tahun 2025..... 17
Tabel 2.5 Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2025..... 17
Tabel 2.6 Jabatan Fungsional Arsiparis Tahun 2025..... 18
Tabel 2.7 Daftar Inventarisasi Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 19
Tabel 2.8 Koleksi Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2024..... 20
Tabel 2.9 Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2025..... 21
Tabel 2. 10 Khasanah Arsip Statis Berdasarkan Instansi Asal Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2025..... 21
Tabel 2.11 Khasanah Arsip Inaktif Berdasarkan Instansi Asal Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2024..... 22
Tabel 2.13 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2025..... 25
Tabel 2.14 Indek Pembangunan Literasi Tahun 2025..... 27
Tabel 2.15 Perumusan Isu Strategis..... 34
Tabel 3.1 Teknis Merumuskan Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir RENSTRA..... 39
Tabel 3.2 Penahapan Renstra..... 40
Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra..... 42
Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 57
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Siak..... 74
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Resntra..... 77
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD..... 77
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD..... 78
Tabel 4.6 Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak..... 80

Lampiran Peraturan Bupati Siak
Nomor : 30 Tahun 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif berwawasan lima tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, Renstra merupakan penjabaran teknis RPJMD memuat arah kebijakan prioritas pembangunan Jangka menengah daerah serta menetapkan target kinerja dan indikator yang terukur selama periode lima tahun kedepan. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai pedoman teknis dalam penyusunan dokumen perencanan pembangunan lima tahunan.

Sedangkan RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan di sertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra menjadi dasar pengembilan keputusan dalam menjawab isu strategis dan permasalahan dilingkungan perangkat daerah, serta dijadikan sebagai pedoman kinerja, alat evaluasi, serta solusi permaslahan strategis untuk meningkatkan

dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sehingga dengan demikian di harapkan antara Renja, Renstra, dan RPJMD akan bersinergi dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak yang keberhasilan pencapainnya merupakan salah satu pendorong untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

1.2 . LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang

daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana strategis perangkat daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 117).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan sebagai satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah seharusnya pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan, tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, maka penyusunan Renstra ini di maksudkan antara lain untuk :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi;
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, merumuskan rencana program/kegiatan/subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam jangka 5 (lima) tahun;;
3. Tolak ukur pelaksanaan tugas, standar pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak;
4. Acuan dan masukan bagi semua pihak pembuat kebijakan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan;

TUJUAN

Dokumen rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Visi, Misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Capaian Program RPJMD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah Terpilih selama masa kepemimpinannya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB – I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB – II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi Perangkat Daerah

3.4 Arah Kebijakan

BAB – IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Program

4.2 Kegiatan

4.3 Sub Kegiatan

4.4 Rencana Pendanaan

4.5 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

4.6 Indikator Kinerja Utama

4.7 Indikator Kinerja Kunci

BAB – V Penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau katya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca. Setiap penyelenggaraan perpustakaan dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran sebagai perangkat daerah pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Berdasarkan jenisnya, perpustakaan daerah kabupaten siak termasuk pada jenis perpustakaan umum, dimana perpustakaan umum diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi. Berdasarkan UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah; menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata diwilayahnya masing-masing.

Selain itu Dinas perpustakaan dan kearsipan menjalankan fungsinya di bidang Kearsipan. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan melalui penyelenggaraan kearsipan yang berdasarkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan baku sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembiaan kearsipan. Berdasarkan UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan, salah satu

tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak adalah memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
b. Pelaksanaam kebijakan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
c. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
d. Penyelenggaraan administrasi Dinas; dan.
e. Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertuus maupun lisam sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor : 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sebagai berikut :

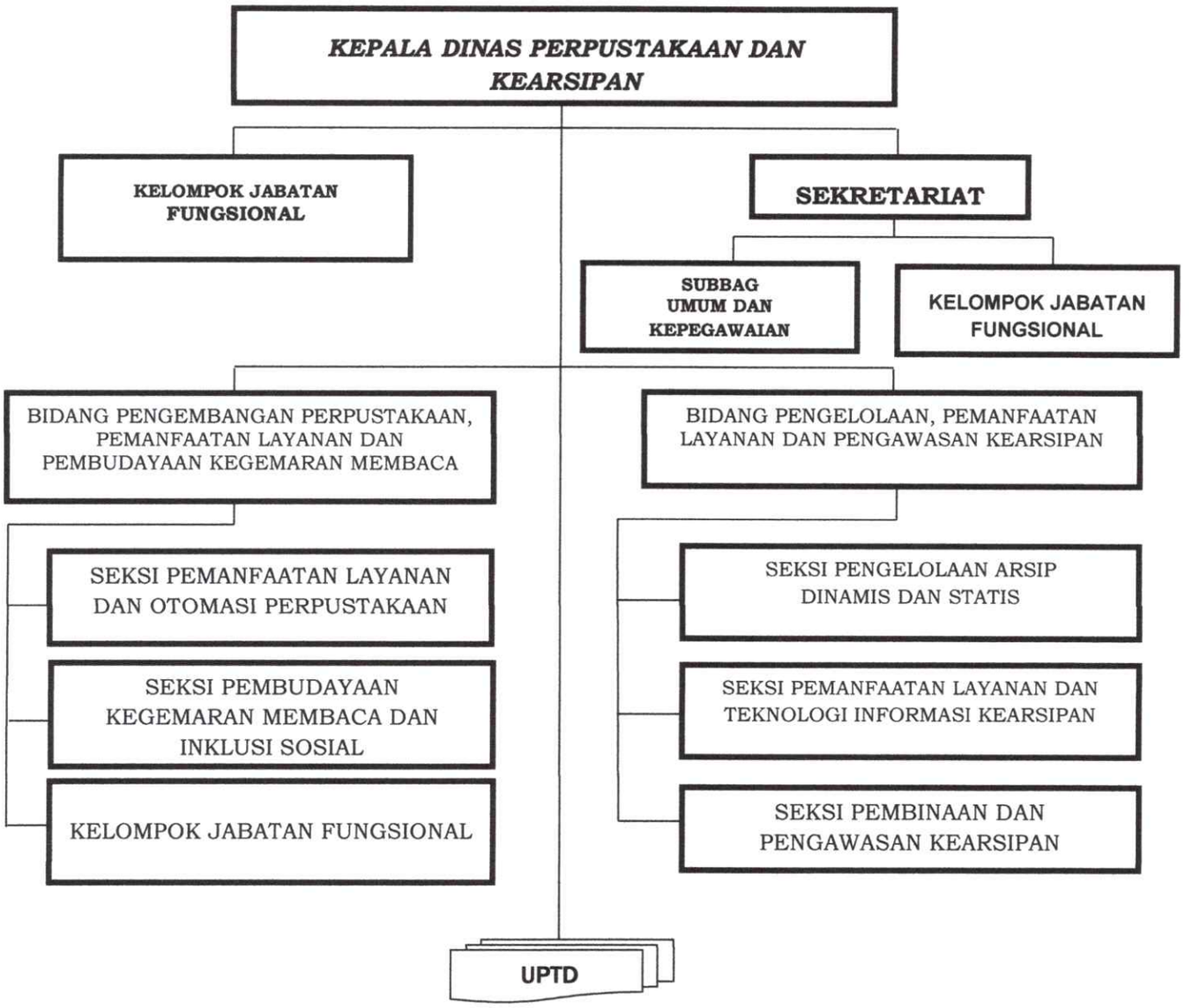
1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris;

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pemanfaatan Layanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
   a. Kepala seksi pemanfaatan layanan dan otomasi perpustakaan;
   b. Kepala seksi pembudayaan kegemaran membaca dan inklusi sosial perpustakaan;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan Layanan dan Pengawasan Kearsipan;
   a. Kepala seksi pengelolaan arsip dinamis dan statis;
   b. Kepala seksi pemanfaatan layanan dan teknologi informasi kearsipan.
   c. Kepala seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Diagram struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini:

Peraturan Bupati Siak
Nomor 117 Tahun 2021



Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 117 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang perpustakaan dan kearsipan;

3. Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak adalah:
    a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
    b. Pelaksanaam kebijakan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
    c. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah;
    d. Penyelenggaraan administrasi Dinas; dan.
    e. Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertuus maupun lisam sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. Uraian tugas dan Fugsi Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, sub bagian, sub bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak diatur pada BAB III dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- Unsur pimpinan atau *top management* dalam hal ini adalah Kepala;
- Unsur Pimpinan dalam manajemen menengah (*middle management*) ada 1 (satu) sekretaris dan 2 (dua) bidang yang dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi yang terdiri dari:

- Fungsi Kesekretariatan membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan kelompok jabatan fungsional;
- Fungsi Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pemanfaatan Layanan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi 2 (dua) Seksi dan kelompok jabatan fungsional yaitu:
  a. Seksi Pemanfaatan Layanan dan Otomasi Perpustakaan;
  b. Seksi pembudayaan kegemaran membaca, dan inklusi sosial;
  c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Fungsi Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan Layanan dan Pengawasan Kearsipan membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu:
  a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis;
  b. Seksi Pemanfaatan Layanan dan Teknologi Informasi Kearsipan;
  c. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan.

- Unsur Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sebagai cerminan dari kelompok keahlian profesional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
- UPT.

2.1.2. SUMBER DAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Sumber Daya merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai guna atau potensi untuk mencapaia tujuan pada sebuah organisasi/ instansi, bisa berupa materi fisik (alam/finansial) bahkan manusia itu sendiri (SDM). Sumber daya yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sumber daya yang dimiliki merupaka hal yang penting yang saling berkaitan untuk dikelola dengan baik dalam mendukung pencapaian tujuan sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Sumber Daya yang dimiliki oleh dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Siak dapat dilihat pada table berikut :

A. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dikelompokan berdasarkan kategori, Tingkat Pendidikan, dan golongan sebagai berikut :

No.	Bagian/Bidang/Sub.Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	

1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretaris	-	1	1
	a. Sekretariat	2	2	4
	b. Subbagian Umum dan Kepegawaian dan staf;	14	22	36
	c. Analisis Perencanaan dan staf;	4	-	4
	d. Analisis Keuangan dan staf.	3	5	8
3	Bidang Pengembangan Perpustakaan, Pemanfaatan Layanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;	1	-	1
	a. Seksi Pemanfaatan Layanan dan Otomasi Perpustakaan dan staf;	6	8	14
	b. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Inklusi Sosial dan staf	2	5	5
4.	Bidang Pengelolaan, Pemanfaatan Layanan dan Pengawasan Kearsipan;	1	-	1
	a. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis dan staf;	1	4	5
	b. Seksi Pemanfaatan Layanan dan Teknologi Informasi Kearsipan dan staf.	2	4	6
	c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan staf	3	1	4
5	**Fungsional**			
	a. Pustakawan		7	7
	b. Arsiparis		4	4

				104

Tabel 2.1 SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak berdasarkan
(Sumber: Sub Bagian umum dan kepegawaian)

Keberadaan SDM Dinas Perpustakaan kabupaten siak dari kategori jabatan dapat dilihat pada tebel berikut :

Status Kepegawaian	Jumlah	%
Pegawai Negeri Sipil		100,00%
- Jabatan Struktural	10	15,63%
- Jabatan Fungsional	1	1,56%
- Jabatan Fungsional Pustakawan	7	10,94%
- Jabatan Fungsional Arsiparis	4	6,25%
- Staf	15	23,44%
Pegawai Honorer Kontrak	**26**	**40,63%**
JUMLAH	**64**	100,00

Tabel 2.2 SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kearsipan berdasarkan Jabatan tahun 2025
(Sumber : Sub Bagian umum dan kepegawaian)

Ketersediaan Tenaga atau SDM ASN dan PPPK di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilihat dari jenjang Pendidikan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	4 Orang
2	Sarjana (Strata 1)	27 Orang
3	Ahli Madya (D.III)	2 Orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5 Orang
	JUMLAH	**38 Orang**

Tabel 2.3 Klasifikasi PNS dan PPPK di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan pendidikan tahun 2025
(Sumber: Sub Bagian umum dan kepegawaian)

No.	Golongan Ruang	A	B	C	D	E	Jumlah	%
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	-	-	1	1	-	2	7,69

3	Golongan III	4	1	7	8	-	20	76,92
4	Golongan IV	2	2	-	-	-	4	15,38
	JUMLAH						**26**	**100,00**

Tabel 2.4 Klasifikasi PNS dan PPPK dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak berdasarkan pangkat/gol tahun 2025

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, perlu didukung oleh 2 (dua) kelompok jabatan fungsional, yaitu: Fungsional Pustakawan dan Fungsional Arsiparis.

Berikut Jabatan Fungsional Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

No	Jenjang Jabatan	Golongan														Jumlah
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	V	VII	IX	
1.	**PUSTAKAWAN**															
	Tingkat Terampil															
	- Pustakawan Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Pustakawan Pelaksana Lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Pustakawan Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	Tingkat Ahli															
	- Pustakawan Pertama	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-			4	6
	- Pustakawan Muda	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				1
	- Pustakawan Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Pustakawan Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		JUMLAH														**7**

Tabel 2.5 Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2025

Berikut Jabatan Fungsional Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak :

No	Jenjang Jabatan	Golongan														Jumlah
		II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	V	VII	IX	
2.	**ARSIPARIS**															
	Tingkat Terampil															

	- Arsiparis Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Arsiparis Pelaksana Lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Arsiparis Penyelia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	Tingkat Ahli															
	- Arsiparis Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Arsiparis Muda	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-				4
	- Arsiparis Madya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
	- Arsiparis Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
		JUMLAH														**4**

Tabel 2.6 Jabatan Fungsional Arsiparis Tahun 2025
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

B. Sarana dan Prasarana

Secara makro, sumber daya pendukung berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, masih perlu ditingkatkan, baik dilihat dari sisi kuantitas maupu kualitas. Jika dibandingkan dengan cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta tanggung jawab & kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan dan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Adapun sarana dan prasarana yang berperan dan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, meliputi: Gedung Kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor lainnya, koleksi bahan pustaka, khasanah Arsip.

a. Gedung Kantor

1. Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak (Rumah Baca) berdiri di atas tanah seluas 6.000 m^2 dengan luas bangunan gedung sekitar 2.212 m^2, berlokasi di Jalan Raja Kecik – Siak Sri Indrapura.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten siak juga memiliki Gedung layanan perpsutakaan umum daerah dengan luas tanah 1.1 ha dan luas bangunan 878 M^2 yang berlokasi di jalan Tengku buwang asmara
3. Gedung Depot Arsip berlokasi di Jalan Raja Kecik – Siak Sri Indrapura.

b. Kendaraan Operasional, Peralatan Kantor lainnya

Kendaraan Operasional, Peralatan Kantor Lainnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dengan rincian seprti terdapat dalam tabel berikut:

No	Nama Barang	Luas		Jumlah	Ket
1	2	3		4	5
A	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 4 a. Mobil Pustaka Keliling b. Mobil Minibus			 4 Unit 6 Unit	 4 baik 6 Baik
B.	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 3			2 Unit	2 Rusak Berat
C.	Jenis Alat-alat Angkutan Roda 2			6 unit	6 Baik
D.	Alat-alat Besar a. Tangga Hydrolic b. Genset			 1 Unit 2 Unit	 1 Baik 2 Baik
E.	Peralatan Kantor Lainnya a. Meja			50 unit	4 Kurang Baik 5 Rusak Berat 41 Baik
	b. Kursi			164 unit	9 Kurang Baik 12 Rusak Berat 143 Baik
	c. Komputer PC			35 unit	8 Kurang Baik 2 Rusak Berat 25 Baik
	d. Laptop			7 unit	2 Kurang Baik – 1 Rusak Berat 4 Baik
	e. Printer			18 unit	4 Kurang Baik - Rusak Berat 14 Baik

Tabel 2.7 Daftar Inventarisasi Barang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

c. Koleksi Buku

Jumlah koleksi buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 16.321 judul dan 88.917 eksamplar buku fisik, dan buku digital (ebook) 3.873 judul dan 3.873 eksamplar dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut:

No	Golongan / Klasifikasi Buku	Jumlah	
		Judul	Eksamplar
A. Koleksi Buku Fisik			
1.	000 Karya Umum	890	6.972
2.	100 Filsafat dan Psikologi	850	6.354
3.	200 Agama	2.051	9.949

4.	300 Ilmu-Ilmu Sosial	2.328	10.634
5.	400 Bahasa	1.531	8.593
6.	500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika	984	8.115
7.	600 Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan	2.468	11.874
8.	700 Kesenian, Hiburan dan Olahraga	1.886	9.858
9.	800 Kesusastraan	1.964	8.741
10.	900 Geografi dan Sejarah	1.101	7.557
11.	Terbitan Berkala	8	8
12.	Referensi	260	262
B. Koleksi Buku Digital (Ebook)			
1.	Ebook	3.790	3.790
2.	Koleksi Referensi Elektronik	19	19
3.	Kliping Elektronik	1	1
	Jumlah	**20.194**	**92.790**

Tabel 2.8 Koleksi Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2024
(Sumber : Bidang Perpustakaan)

Koleksi Deposit sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR, dengan rincian seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2025

No.	Jenis	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Buku	233 eksamplar
2.	Majalah	46 eksamplar
3.	Jurnal	-
4.	Tabloid	-

5.	Buletin	2 Judul
6.	Laporan	-
7.	Brosur	-
8.	Kaset/CD/VCD	-
9.	Peta	1
10.	Koran	1 Judul

Tabel 2.9 Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2025
(Sumber : Bidang pustaka)

d. Khasanah Arsip

Khasanah arsip yang tersimpan terdiri dari arsip Dinamis, Statis dan Inaktif yang tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Bidang Arsip.

No	Instansi Asal Arsip	Jumlah Arsip	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25 Berkas	2021
2.	Hukum	133 Berkas	2021
3.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3 Berkas	2022
4.	Dinas Pariwisata	6 Berkas	2022
5.	Dinas Perhubungan	4 Berkas	2023
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6 Berkas	2023
7.	BAPPEDA	20 Berkas	2023
8.	DPMPTSP	14 Berkas	2023
9.	Dinas Ketahanan Pangan	3 Berkas	2023
10.	Kecamatan Pusako	3 Berkas	2023
11.	Kecamatan Dayun	15 Berkas	2024
12.	Kecamatan Tualang	23 Berkas	2024
13.	Kecamatan Lubuk Dalam	28 Berkas	2024
14.	Kecamatan Koto Gasib	4 Berkas	2024
15.	Dinas PU TARUKIM	3 Berkas	2024
16.	Dinas Peternakan dan Perikanan	9 Berkas	2024
17.	Dinas Kesehatan	39 Berkas	2024
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21 Berkas	2024
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11 Berkas	2024
20.	Dinas Komunikasi dan Informasi	24 Berkas	2024
21.	Dinas Pertanian	6 Berkas	2024

Tabel 2. 10 Khasanah Arsip Statis Berdasarkan Instansi Asal Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2025
(Sumber : Bidang Kearsipan)

Khasanah Arsip Inaktif

No	Instansi Asal Arsip	Jumlah Arsip	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BKPSDMD	45 Berkas	2021
2.	DPMK	43 Berkas	2021
3.	DISKOMINFO	151 Berkas	2021
4.	Kecamatan Lubuk Dalam	2191 Berkas	2021
5.	Kecamatan Pusako	545 Berkas	2021
6.	Kecamatan Sabak Auh	1062 Berkas	2021
7.	Dinas Lingkungan Hidup	167 Berkas	2022
8.	DISTRANSNAKER	287 Berkas	2022
9.	SATPOL PP	656 Berkas	2022
10.	Kecamatan Dayun	525 Berkas	2022
11.	Kecamatan Kerinci Kanan	304 Berkas	2022
12.	Kecamatan Tualang	656 Berkas	2022
13.	Kecamatan Dayun	1467 Berkas	2023
14.	SETWAN DPRD	67 Berkas	2023
15.	BPBD	699 Berkas	2023
16.	DPMPTSP	524 Berkas	2023
17.	Kecamatan Bungaraya	500 Berkas	2023
18.	Kecamatan Minas	1692 Berkas	2023
19.	Kecamatan Koto Gasib	859 Berkas	2023
20.	BAPPEDA	148 Berkas	2023
21.	DISPORA	2774 Berkas	2023
22.	KESBANGPOL	1078 Berkas	2023
23.	Kecamatan Kandis	1848 Berkas	2024
24.	Kecamatan Minas	891 Berkas	2024
25.	Kecamatan Sungai Mandau	1697 Berkas	2024
26.	Kecamatan Sabak Auh	24 Berkas	2024
27.	Dinas Pertanian	954 Berkas	2024
28.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	483 Berkas	2024

Tabel 2.11 Khasanah Arsip Inaktif Berdasarkan Instansi Asal Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak sampai tahun 2024
(Sumber : Bidang Kearsipan)

2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kinerja dapat diartikan bagaimana kita dapat menunjukan hasil atau manfaat, sementara pelayanan atau *to service* disebuah perpustakaan berbeda dengan layanan

pada kegiatan kemasyarakatan yang lain, seperti layanan kesehatan, kependudukan, dan layanan keamanan. Perbedaan itu tentu dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing–masing bidang, meskipun pada dasarnya suatu layanan mempunyai prinsip-prinsip yang sama atau berdekatan. Prinsip-prinsip layanan itu misalnya :

A. Sesuai dengan atau untuk kebutuhan masyarakat yang akan dilayani;
B. Diusahakan berlangsung cepat, tepat, mudah dan sederhana;
C. Menciptakan kesan yang menarik dan menyenangkan atau memuaskan pemakai/penerima layanan.

Jadi kinerja pelayanan dapat disimpulkan bagaimana kita dapat menunjukan hasil atau manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani berlangsung cepat, tepat mudah dan sederhana yang terkesan menarik dan menyenangkan serta memuaskan bagi pemakai/penerima layanan.

Indikator Kinerja Utama menjadi tolak ukur dalam memberi pelayanan serta mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan arsip yang tertib dilingkungan pemerintah kabupaten siak, berdasarkan jumlah penduduk kabupaten siak pada tahun 2024 ± 487.670,- orang dapat kami perkirakan bahwa pengunjung perpustakaan telah mencapai sekitar 36,00%, target pengunjung pada tahun 2024 175.359 orang dengan realisasi 175.582 orang, persentase pencapain pengunjung sekitar 100.13%. target pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak yang ingin di capai pada periode 5 tahun mendatang sekitar ± 193.334,- orang pengunjung atau sekitar 42,09% dari jumlah penduduk. Pengelolaan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, pengelolaan kearsipan mencapai 107,14% di tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Angka Literasi			Persentase Arsip Statis Daerah	82,50%	86,21%	90,45%	95,23%	100,00%	82,50%	86,21%	87,70%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	96,96%	0,00%	0,00%
				Persentase OPD dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, Bumd, Parpol Yang Dilakukan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	83,87%	87,10%	90,32%	93,55%	100,00%	79,03%	87,10%	107,14%	0,00%	0,00%	94,23%	100,00%	118,62%	0,00%	0,00%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	BB	BB	A	B	B	B	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,04%	100,00%	100,00%
				Nilai Predikat Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB	A	A	AA	AA	BB	BB	BB	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	97,34%	100,00%	100,00%
				Persentase peningkatan Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	34,73%	36,47%	38,29%	40,21%	42%	40,25%	40,67%	36,00%	0,00%	0,00%	115,89%	111,53%	94,01%	0,00%	0,00%

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Indikator kinerja Kunci dan indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja kunci (IKK) merupakan kinerja operasional yang mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak yang berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

1. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Siak periode 2021-2025 dapat dilihat pada tebel berikut :

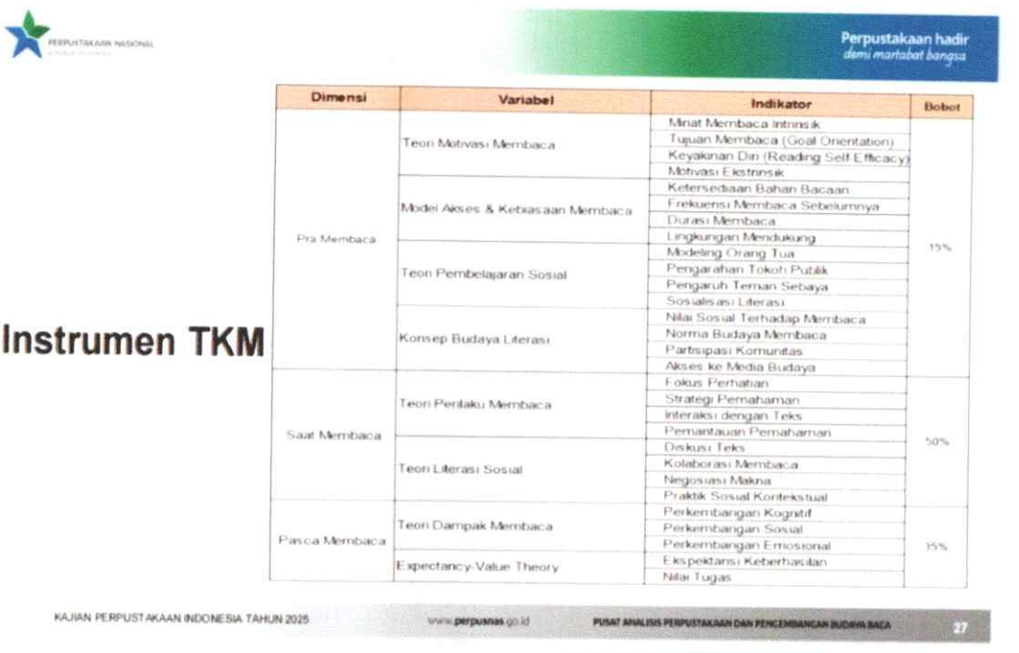
No.	Tahun	Nilai TKM	Keterangan
1.	2021	-	
2.	2022	-	
3.	2023	57,97	Sedang
4.	2024	69,65	Sedang
5.	2025	59.02	rendah

Tabel 2.13 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Tingkat Kegemaran Membaca kabupaten siak dari tahun 2023 57,97 tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 69,65 atau termasuk kategori sedang. Dimana Nilai TKM kabupaten Siak tahun 2024 masih dibawah TKM provinsi Riau yaitu 70,26 atau kategori sedang. Namun dari penghitungan hasil survey yang dilakukan oleh perpustakaan Nasional RI Nilai Tingkat kegemaran membaca Kabupaten Siak tahun 2025 sebesar 59,02 kategori rendah atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

NILAI TKM KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	56.76	60.64	66.59	62.21	rendah
2	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	21.57	23.71	25.33	23.99	sangat rendah
3	Aceh	Kab. Aceh Besar	54.04	58.37	62.23	59.14	rendah
4	Aceh	Kab. Aceh Jaya	56.93	60.85	66.01	62.14	rendah
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan	58.52	63.82	67.49	64.4	rendah
6	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.65	59.29	62.44	59.77	rendah
7	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	55.97	62.41	64.33	62.2	rendah
8	Aceh	Kab. Aceh Tengah	54.2	58.77	62.19	59.35	rendah
9	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	56.03	60.05	64.72	61.15	rendah
10	Aceh	Kab. Aceh Timur	56.97	61.51	64.54	61.97	rendah
11	Aceh	Kab. Aceh Utara	55.25	60.11	62.25	60.21	rendah
12	Aceh	Kab. Bener Meriah	54.68	59.23	61.34	59.36	rendah
13	Aceh	Kab. Bireuen	54.65	59.63	64.47	60.65	rendah
14	Aceh	Kab. Gayo Lues	51.71	55.18	56.69	55.24	rendah
15	Aceh	Kab. Nagan Raya	53.71	58.72	59.83	58.43	rendah
16	Aceh	Kab. Pidie	59.11	63.66	69.08	64.96	rendah
17	Aceh	Kab. Pidie Jaya	58.67	61.89	65.09	62.6	rendah
18	Aceh	Kab. Simeulue	33.08	35.8	37.44	36.01	sangat rendah
19	Aceh	Kota Banda Aceh	55.89	61.2	65.28	61.91	rendah
20	Aceh	Kota Langsa	54.98	59.24	62.46	59.8	rendah
21	Aceh	Kota Lhokseumawe	57.28	60.94	67.9	62.9	rendah
22	Aceh	Kota Sabang	46.38	49.59	54.99	51.06	rendah
23	Aceh	Kota Subulussalam	31.69	33.71	37.03	34.61	sangat rendah
24	Sumatera Utara	Kab. Asahan	53.41	57.73	60.25	58.03	rendah
25	Sumatera Utara	Kab. Dairi	54.74	60.45	64.33	61.03	rendah
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	54.71	59.4	61.95	59.66	rendah
27	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	53.94	57.85	59.91	58.05	rendah
56	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	53.77	56.97	60.75	57.87	rendah
57	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	55.05	60.49	63.03	60.64	rendah
58	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	53.21	56.47	62.92	58.29	rendah
59	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	52.55	55.42	60.29	56.74	rendah
60	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	54.72	58.35	60.96	58.78	rendah
61	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	57.26	60.6	66.59	62.26	rendah
62	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	58.21	61.86	66.02	62.85	rendah
63	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	55.19	58.39	64.96	60.27	rendah
64	Sumatera Barat	Kab. Solok	53.8	57.52	65.06	59.66	rendah
65	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	56.22	62.35	64.77	62.36	rendah
66	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	53.98	56.85	64.14	59.03	rendah
67	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	42.08	43.64	47.53	44.81	sangat rendah
68	Sumatera Barat	Kota Padang	55.21	59.24	63.49	60.19	rendah
69	Sumatera Barat	Kota Padang panjang	66.66	69.89	74.11	70.99	sedang
70	Sumatera Barat	Kota Pariaman	51.73	55.23	59.71	56.32	rendah
71	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	54.4	56.02	63.47	58.43	rendah
72	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	53.3	56.75	63.54	58.67	rendah
73	Sumatera Barat	Kota Solok	53.27	57.44	63.79	59.1	rendah
74	Riau	Kab. Bengkalis	54.22	58.29	61.88	59	rendah
75	Riau	Kab. Indragiri Hilir	53.81	58.45	63.45	59.57	rendah
76	Riau	Kab. Indragiri Hulu	51.98	56.61	62.94	58.19	rendah
77	Riau	Kab. Kampar	56.66	61.74	64.94	62.18	rendah
78	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	53.97	57.62	62.23	58.74	rendah
79	Riau	Kab. Kuantan Singingi	53.58	57.51	62.67	58.79	rendah
80	Riau	Kab. Pelalawan	50.76	55.98	59.38	56.45	rendah
81	Riau	Kab. Rokan Hilir	55.8	60.11	65.04	61.26	rendah
82	Riau	Kab. Rokan Hulu	54.29	58.19	61.32	58.77	rendah
83	Riau	Kab. Siak	54.3	58.33	61.83	59.02	rendah
84	Riau	Kota Dumai	53.89	56.74	61.7	58.1	rendah
85	Riau	Kota Pekanbaru	52.48	56.98	61.03	57.79	rendah



Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
Pra Membaca	Teori Motivasi Membaca	Minat Membaca Intrinsik	15%
		Tujuan Membaca (Goal Orientation)	
		Keyakinan Diri (Reading Self Efficacy)	
		Motivasi Ekstrinsik	
	Model Akses & Kebiasaan Membaca	Ketersediaan Bahan Bacaan	
		Frekuensi Membaca Sebelumnya	
		Durasi Membaca	
		Lingkungan Mendukung	
	Teori Pembelajaran Sosial	Modeling Orang Tua	
		Pengarahan Tokoh Publik	
		Pengaruh Teman Sebaya	
		Sosialisasi Literasi	
	Konsep Budaya Literasi	Nilai Sosial Terhadap Membaca	
		Norma Budaya Membaca	
		Partisipasi Komunitas	
		Akses ke Media Budaya	
Saat Membaca	Teori Perilaku Membaca	Fokus Perhatian	50%
		Strategi Pemahaman	
		Interaksi dengan Teks	
		Pemantauan Pemahaman	
	Teori Literasi Sosial	Diskusi Teks	
		Kolaborasi Membaca	
		Negosiasi Makna	
		Praktik Sosial Kontekstual	
Pasca Membaca	Teori Dampak Membaca	Perkembangan Kognitif	35%
		Perkembangan Sosial	
		Perkembangan Emosional	
	Expectancy-Value Theory	Ekspektansi Keberhasilan	
		Nilai Tugas	

Pengukuran Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Siak tahun 2025 yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI mengacu kepada 3 (tiga) dimensi penilaian, dari hasil penilaian di atas dapat dilihat masih rendahnya dimensi Pra membaca yaitu diangka 54.3.

2. Indek Pembangunan Literasi Masyarakat(IPLM)

Nilai IPLM dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melihat pencapaian kinerja yang dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan daerah serta pembangunan literasi masyarakat

No.	Tahun	Nilai IPLM	Keterangan
1.	2021	68,56	
2.	2022	68,85	
3.	2023	70,06	
4.	2024	69,31	
5.	2025	10,81	Hasil survey perpusnas RI dengan metode penghitungan terbaru

Tabel 2.14 Indek Pembangunan Literasi Tahun 2025

Lampiran Surat
Nomor B 844/4/APB.00.02/II/2026
Tanggal 20 Februari 2026

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.406	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
286	KAB. PURWOREJO	0.133	0.128	0.116	0.191	0.13	0.153	9.36
287	KAB. REJANG LEBONG	0.166	0.112	0.148	0.211	0.139	0.179	1.95
288	KAB. REMBANG	0.041	0.053	0.04	0.065	0.047	0.053	0.45
289	KAB. ROKAN HILIR	0.136	0.173	0.108	0.216	0.154	0.162	2.8
290	KAB. ROKAN HULU	0.182	0.174	0.144	0.189	0.178	0.167	5.33
291	KAB. ROTE NDAO	0.17	0.137	0.206	0.195	0.154	0.2	9.05
292	KAB. SABU RAIJUA	0.17	0.305	0.205	0.393	0.237	0.299	28.05
293	KAB. SAMBAS	0.047	0.1	0.072	0.103	0.074	0.087	8.34
294	KAB. SAMPANG	0.209	0.229	0.179	0.304	0.219	0.242	2.52
295	KAB. SANGGAU	0.183	0.418	0.565	0.453	0.3	0.509	32.02
296	KAB. SARMI	0.114	0.193	0.094	0.199	0.153	0.146	5.17
297	KAB. SAROLANGUN	0.138	0.128	0.177	0.301	0.133	0.239	20.71
298	KAB. SEKADAU	0.228	0.309	0.211	0.4	0.269	0.305	1.49
299	KAB. SELUMA	0.126	0.179	0.106	0.167	0.152	0.136	7.07
300	KAB. SEMARANG	0.219	0.177	0.215	0.309	0.198	0.262	11.59
301	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	0.179	0.225	0.156	0.289	0.202	0.223	5.78
302	KAB. SERANG	0.211	0.175	0.202	0.292	0.193	0.247	3.52
303	KAB. SERDANG BEDAGAI	0.229	0.195	0.156	0.238	0.212	0.197	1.18
304	KAB. SERUYAN	0.091	0.135	0.134	0.2	0.113	0.167	9.86
305	KAB. SIAK	0.062	0.096	0.086	0.155	0.079	0.121	10.81
306	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0.098	0.157	0.22	0.234	0.128	0.227	19.73
307	KAB. SIDOARJO	0.245	0.272	0.256	0.35	0.259	0.303	10.96
308	KAB. SIGI	0.231	0.11	0.18	0.387	0.171	0.283	22.84
309	KAB. SIJUNJUNG	0.248	0.195	0.2	0.297	0.221	0.248	11.04
310	KAB. SIKKA	0.155	0.135	0.134	0.31	0.145	0.222	1.48
311	KAB. SIMEULUE	0.157	0.133	0.161	0.459	0.145	0.32	0.85
312	KAB. SINJAI	0.076	0.217	0.11	0.156	0.146	0.133	13.7
313	KAB. SINTANG	0.246	0.202	0.146	0.259	0.224	0.203	0.9
314	KAB. situbondo	0.11	0.173	0.118	0.205	0.141	0.162	10.24
315	KAB. SLEMAN	0.182	0.155	0.172	0.251	0.169	0.212	11.14

Pada periode renstra 2021-2026, telah dilakukan pengukuran terhadap indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten siak yang dilakukan oleh perpustakaan nasional RI. Dari tabel di atas nilai IPLM Kabupaten Siak berada pada kategori sedang. Pada periode 2025 perolehan nilai IPLM Kabupaten Siak sebesar 10,81 mengalami penurunan, namun metode penghitungan yang dilakukan oleh Perpusnas RI mengalami perubahan, dimana sebelumnya dinilai melalui 7 unsur dan saat ini hanya pada 3 dimensi dengan besaran bobot yang telah ditetapkan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Perpustakaan hadir
demi martabat bangsa

Indikator dan Pembobotan IPLM

Dimensi	Varibel	Indikator	Bobot
Kepatuhan	Koleksi	Jumlah Koleksi tercetak	30
		Jumlah Koleksi elektronik	
		Penambahan koleksi tercetak	
		Penambahan koleksi elektronik	
		Komitmen anggaran pengembangan Koleksi	
	SDM	Pustakawan sesuai kualifikasi	
		Tenaga teknis perpustakaan	
		Tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB	
		Komitmen pengembangan SDM (biaya diklat)	
Kinerja	Layanan	Koleksi tercetak yang dimanfaatkan	70
		Koleksi elektroik yang dimanfaatkan	
		Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi	
		Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring	
		Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK	
		Jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan literasi	
	Pengelolaan	Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan	
		Jumlah variasi dan layanan yang tersedia	
		Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan	
		Komitmen anggaran pengembangan layanan dan pengelolaan	

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan. Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Siak meliputi :

1. Perangkat daerah

   Perangkat daerah, kecamatan dan kampung dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan kearsipan;
2. Masyaratakat secara tidak langsung seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan akses informasi melalui layanan perpustakaan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan informasi dan pengetahuan bagi berbagai kelompok usia dan latar belakang. Layanan ini mencakup akses ke bahan bacaan yang merata dan berkualitas, refensi, arsip serta berbagai program literasi. Dengan menyediakan layanan yang beragam dan inklusif Dinas Perpustakan dan Kearsipan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung Pendidikan yang berkualitas dan merata di kab. Siak.

2.1.5. MITRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Siak menjalin berbagai kemitraan untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kemitraan ini mencakup berbagai sektor baik pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, maupun organisasi masyarakat demi meningkatkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan di Kab. Siak.

Berikut beberapa kemitraan yang dijalin oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak :

- Kemitraan dengan PD (Perangkat Daerah) Lainnya

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalin kerja sama dengan berbagai PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak untuk mendukung penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital dan penyediaan perpustakaan khusus Perangkat daerah. Kemudian kemitraan yang dibangun dengan Perangkat daerah guna penyediaan layanan perpustakaan khusus (Perpustakaan Perangkat daerah) atau pojok baca pada setiap PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

- Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan sekolah – sekolah dan perguruan tinggi di Kab. Siak untuk meningkatkan minat baca dan litersari masyarakat melalui peningkatan pemanfaatan layan perpustakaan;

- Kemitraan dengan organisasi masyarakat

Dalam meningkatkan literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkolaborasi dengan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi dan promosi perpustakaan.

Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk mewujudkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang inklusif, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan Literasi masyarakat melalui peningkatan kegemaran membaca maka dinas perpustakaan dan kearsipan perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, melalui kemitraan ini diharapkan mendapatkan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam peningkatan layanan kepada masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak adalah yang berkaitan dengan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proposional. Demikian pula halnya terkait dengan pelayanan publik, khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat, belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang diinginkan belum dapat diwujudkan sesuai dengan standar nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Siak dapat dipetakan secara komprehensif melalui analisis dari beberapa faktor baik internal (kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan). Hasil analisi ini dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi yang ada saat ini, dan juga sebagai bahan penyusunan strategi pengembangan yang lebih terarah.

a. Tantangan

Tantangan adalah hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak antara lain:

1. Keterbatasan insfrastruktur sarana dan prasarana pendukung perpustakaan dan kearsipan serta penerapan teknologi informasi yang belum memadai untuk menunjang layanan berbasis digital.
2. Minat baca masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, sehingga tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan belum optimal.
3. Akses terhadap sumber informasi bahan bacaan yang belum merata, terutama di wilayah perdesaan atau daerah terpencil
4. Kondisi geografis kabupaten siak
5. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
6. perpustakaan dan kearsipan, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat.

b. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas Perpustakan Kabupaten Siak dalam mencapai Visi dan Misinya adalah:

a. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan daerah terhadap tata kelola kearsipan serta pengembangan layanan perpustakaan, sehingga memberikan landasan yang kuat dalam pelaksanaan program;
b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi koleksi, digitalisasi arsip, layanan perpustakaan berbasis teknologi, dan perluasan akses informasi;
c. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, komunitas yang dapat membantu pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan;
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi untuk pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup;
e. Perluasan jaringan perpustakaan dan kearsipan baik di tingkat nasional (melalui Indonesia OneSearch, Jaringan Arsip Nasional) maupun regional, yang membuka kesempatan untuk sinergi, kolaborasi, dan pertukaran informasi.

c. Kekuatan

a. Perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan, yang mendorong

peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi, literasi, serta layanan perpustakaan dan kearsipan.

b. Perkembangan bidang pendidikan, yang semakin menempatkan perpustakaan dan arsip sebagai sarana penting dalam mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
c. Adanya kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan, yang memberikan dukungan regulasi.

d. Kelemahan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah pada bidang perpustakaan, kearsipan, dan teknologi informasi, sehingga berdampak pada optimalisasi layanan.
2. Kurangnya dukungan pemangku kepentingan dan keterbatasan wewenang dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Dari analisis SWOT yang disajikan di atas, dapat sampaikan yang menjadi permasalahan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten siak Adalah :

1. Keterbatasan insfrastruktur sarana dan prasarana pendukung perpustakaan dan kearsipan serta penerapan teknologi informasi yang belum memadai untuk menunjang layanan berbasis digital;
2. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang perpustakaan dan kearsipan
3. Minat baca masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, sehingga tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan belum optimal.
4. Akses terhadap sumber informasi bahan bacaan yang belum merata, terutama di wilayah perdesaan atau daerah terpencil.
5. Kondisi geografis kabupaten siak;
6. Rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan kearsipan, baik di kalangan aparatur maupun masyarakat.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, potensi yang dimiliki oleh Dinas perpustakaan dan kearsipan adalah:

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan daerah terhadap tata kelola

kearsipan serta pengembangan layanan perpustakaan

2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi koleksi, digitalisasi arsip, layanan perpustakaan berbasis teknologi, dan perluasan akses informasi;
3. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, komunitas yang dapat membantu pengembangan layanan perpustakaan dan kearsipan;
4. Perkembangan bidang pendidikan, yang semakin menempatkan perpustakaan dan arsip sebagai sarana penting dalam mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
5. Adanya program transformasi perpustakaan yang menjadikan perpustakaan sebagai pusat aktivitas belajar dan sosial.

Perumusan Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang			Isu Strategis Perangkat
				Global	Nasional	Regional	
	Bonus demografi usia produktif	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan dan insfrastruktur kualitas Pendidikan, kesehatan serta peran agama dan budaya dalam mendorong daya saing	Bonus demografi	Bonus demografi	Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif unggul,sejahtera	1. Peningkatan literasi dan budaya baca masyarakat 2. Peningkatan perpustakaan sesuai SNP 3. Peningkatan sarana pendukung layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan koleksi perpustakaan 5. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan

	Potensi pengembangan Infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan kemudahan akses pelayanan	Transformasi kearsipan menuju digitalisasi arsip	Belum adanya strategi *Transformation digital government*	Perkembangan teknologi dan Artificial Intelligence akan mengubah cara kerja industri global yang meberikan peluang besar bagi Riau untuk menarik investasi	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dalam menghadapi ancaman dimasa depan	Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas	1. Transformasi kearsipan menuju digitalisasi arsip/ SIKN; 2. Pemerataan dan kompetensi tenaga kearsipan; 3. Peningkatan kualitas tata Kelola kearsipan; 4. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) 5. Tingkat Ketersediaan Arsip

Tabel 2.15 Perumusan Isu Strategis

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak selama 5 (lima) tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) s.d 5 (lima) Tahun.
Adapun korelasi dari rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategi Kabupaten Siak 2025-2029 terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak terdapat pada **Misi 3 dan Misi 6** yaitu : Tujuan dari Misi 3 "Terwujudnya manusia yang berkualitas unggul, hebat, dan berkarakter budaya melayu". dan Tujuan dari Misi 6 "Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi dan bermartabat".

Fokus utama penentuan Tujuan adalah tindakan alokasi dan sumber daya kegiatan operasional setiap tahun. Tujuan adalah suatu bagian integral dari proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk menyatakan dan menentukan pencapain kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sesuai dengan uraian di atas misi adalah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat;
2. Meningkatnya pengembangan Seni dan Kebudayaan;
3. Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik.

Tujuan di atas menegaskan bahwa Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Siak terus berupaya untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya pengembangan seni dan budaya, serta meningkatnya transparansi dan akses informasi publik. Peran perpustakaan sebagai ruang publik yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan fokus pada pemerataan akses literasi yang inklusif. Perpustakaan dihadirkan bukan sekadar sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi sebagai pusat interaksi,

pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah ditetapkan, sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kabupaten Siak dalam jangka waktu tahunan, sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran di dalam rencana strategis Kabupaten Siak 2025-2029 terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak terdapat pada Misi 3 : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Tangguh, Agamis, Berbudaya Melayu Sebagai Payung Negeri dengan sasaran "Meningkatnya Literasi Masyarakat". dan pada Misi 6 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dengan Mendorong Transparansi Dan Partisipasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Berintegritas Dan Humanis dengan sasaran "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan".

Dalam mendukung tercapainya Misi Pemerintah daerah, terdapat duasasaran yang telah dirumuskan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak antara lain:

1). Meningkatnya Literasi Masyarakat;

2). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam meningkatkan Literasi masyarakat dapat diukur melalui dua indikator yaitu :

1. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

   Kajian Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Indonesia dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting untuk memahami budaya membaca masyarakat di Indonesia. Tingkat Kegemaran Membaca diukur dengan beberapa dimensi antara lain frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet, dan durasi akses internet. Selain dimensi tersebut, terdapat aspek pendukung dalam kegiatan gemar membaca masyarakat, yaitu aspek perilaku membaca masyarakat. Aspek ini meliputi preferensi membaca, dampak kegiatan membaca, perilaku masyarakat terhadap perpustakaan, dan kepuasan masyarakat terhadap perpustakaan umum.

Penghitungan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

TGM= (0.3FM + 0.3DM + 0.3JB) + (0.05 FAI + 0.05 DAI)

Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur 5 parameter yaitu

1. Frekuensi membaca per minggu (kali);
2. Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam);
3. Banyaknya bahan bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul);
4. Frekuensi Akses Internet; dan
5. Durasi Akses Internet

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan, yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya.

Analisi data IPLM

1. Pengelompokan Dimensi:
   - dim_kepatuhan = rata-rata(sub_koleksi, sub_sdm)
   - dim_kinerja = rata-rata(sub_pelayanan, sub_pengelolaan)
2. Bobot:
   - Kepatuhan 0,30
   - Kinerja 0,70
3. Indeks RealScore: Indeks_Real_0_100 = 100 × (0,30×dim_kepatuhan + 0,70×dim_kinerja)
   (KAJIAN PERPUSTAKAAN INDONESIA 2025)

Sedangkan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur melalui 3 indikator berikut :

1. Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)

secara lebih spesifik tujuan penyelenggaraan kearsipan diatur dalam pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan salah satunya yaitu menjamin

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. pada penjelasan Undang-Undang Kearsipan menyatakan pula bahwa Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan. Indeks Memori Kolektif Bangsa mengukur kinerja dalam meningkatkan ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan, serta penetapan arsip sebagai memori kolektif bangsa, yang selanjutnya dapat dilayankan kepada public. Ketersediaan arsip yang memadai merupakan elemen kunci dalam membangun memori kolektif bangsa yang autentik dan terpercaya. Jika arsip yang ada tidak cukup untuk mencerminkan sejarah bangsa atau jika arsip yang penting hilang atau tidak dikelola dengan baik, maka akan tercipta ketidakseimbangan dalam representasi memori kolektif nasional

Berikut merupakan rumusan dalam menetukan Tingkat Ketersediaan Arsip

Tingkat ketersediaan Arsip

T = (a+i+s+j) / 4

T = tingkat ketersediaan arsip

a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip

i = persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip

s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik

j = persenta sejumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN

4. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) dapat diukur melalui penghitungan berikut :
   Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan = 60% ASKE+40% ASKI
5. Nilai SAKIP, penilaian dilakukan langsung oleh Inspektorat.

Rumusuan Tujuan dan sasaran Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak tertuang pada table berikut :

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,89	13,14	13,39	13,64	13,89	14,14	14,39	
Meningkatnya pengembangan Seni dan Kebudayaan	Meningkatnya pengembangan Seni dan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	62,18	65,33	67,48	70,63	72,78	73,93	75,08	
- Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik	Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik		Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Poin)	-	-	1,77	1,80	1,83	1,93	2,00	
		Meningkatnya Angka Literasi	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	69,86	69,86	70,41	70,96	71,51	72,06	72,06	
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	69,65	69,65	70,03	70,58	70,97	71,36	71,36	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	33,00	33,00	51,00	66,75	83,00	100,00	100,00	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	73,70	73,70	75,30	77,90	78,70	80,30	80,30	
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)	79,60	80,00	81,50	82,80	83,50	83,70	83,70	

Tabel 3.1 Teknis Merumuskan Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir RENSTRA

3.3. SRATEGI PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Siak melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Siak menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan peepustakaan dan kearsipan melalui program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Penahapan Renstra

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
1	2	3	4	5
Peningkatan literasi dan budaya baca masyarakat	Peningkatan mutu Layanan perpustakaan sesuai SNP	Peningkatan sarana pendukung layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan koleksi perpustakaan	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia perpustakaan
Transformasi kearsipan menuju digitalisasi arsip/ SIKN	Pemerataan dan kompetensi tenaga kearsipan;	Peningkatan kualitas tata Kelola kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pelaksanaan arah kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISPUSIP	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Meningkatkan Literasi masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan 2. Meningkatkan penguatan literasi dan budaya gemar membaca	1. Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota sesuai SNP 2. Meningkatnya insfrastruktur layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi 3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan bacaan perpustakaan 4. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan	
2	Meningkatnya Tata kelola kearsipan	Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah	1. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota 2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota 3. Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota 4. Peningkatan kualitas tata Kelola kearsipan; 5. Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISPUSIP	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Keberhasilan Rencana dan Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak bisa dipisahkan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak yang memiliki dua urusan yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, dalam pelaksanaan urusan tersebut menggunakan 5 (lima) Program yang mengacu kepada Nomenklatur Peraturan Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406-24 tahun 2024.

Adapun program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;
4. Program Pengelolaan Arsip;
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program penunjang urusan pemerintah daerah merupakan program yang bertujuan untuk mendukung operasional, administrasi dan kinerja perangkat daerah. Urusan Perpustakaan memiliki 2 (dua) program yaitu Program pembinaan perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, sedangkan urusan kearsipan memiliki 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

4.2 Uraian Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan kearsipan kabupaten siak memiliki 17 kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6.

B. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

Kegiatan :

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

E. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan :

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Dari 5 (lima) Program, 17 Kegiatan, Dinas Perpustakaan dan kearsipan memiliki 53 Sub kegiatan.

URUSAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

B. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Daerah;

- Pengadaan kendaraan perorarangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
- Pengadaan Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah;

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik'
- Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
- Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno;

A. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

B. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
- Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

3. Program Pengelolaan Arsip;

A. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

- Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI;
- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis.

C. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

A. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

B. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

- Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
- Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

C. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
- Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan

D. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

- Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
- Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

E. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

- Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
- Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
- Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat **Meningkatnya pengembangan Seni dan Kebudayaan**	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat** **Meningkatnya pengembangan Seni dan Kebudayaan**				**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**	**2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan**	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	**2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**	
		Meningkatnya Angka Literasi			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
					Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan		Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	**2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	
				Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mew ujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kew enangan Kabupaten/Kota dalam mew ujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kew enangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakaw an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mew ujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kew enangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kew enangan Kabupaten/Kota dalam mew ujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakaw an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakaw an Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mew ujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
				Meningkatnya Minat baca melalui pengembangan literasi masyarakat	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di w ilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kew enangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di w ilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kew enangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kew enangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, peraw atan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, peraw atan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Peraw atan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
				Meningkatnya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)		
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)		
					Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Angka)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik	**Meningkatnya Transparansi dan Akses Informasi Publik**				**Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Poin)**	**2.24.02 Program Pengelolaan Arsip**	
						2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis		Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
					Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
				Jumlah Simpul Jaringan dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Infomasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
				Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
				Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	
				Terlaksananya jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	

Tabel 4. 1 Rumusan Program /Kegiatan /Subkegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

4.4 RENCANA PENDANAAN

Berikut Program/ kegiatan/ subkegiatan dengan rencana pendanaan sampai lima tahun kedepan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Siak dapat dilihat pada table berikut:

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.984.489.566,90		6.151.971.115,54		6.324.643.904,00		6.502.534.679,84		6.685.773.639,33		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.808.157.666,90		4.945.005.167,94		5.086.094.379,21		5.231.447.155,86		5.381.169.879,97		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	100	4.808.157.666,90	100	4.945.005.167,94	100	5.086.094.379,21	100	5.231.447.155,86	100	5.381.169.879,97	2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.900.000.000,00		4.000.000.000,00		4.100.000.000,00		4.160.000.000,00		4.200.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	96	3.900.000.000,00	96	4.000.000.000,00	96	4.100.000.000,00	96	4.160.000.000,00	96	4.200.000.000,00		
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.900.000.000,00		4.000.000.000,00		4.100.000.000,00		4.160.000.000,00		4.200.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	96	3.900.000.000,00	96	4.000.000.000,00	96	4.100.000.000,00	96	4.160.000.000,00	96	4.200.000.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		0,00		19.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	15.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	0	0,00	1	19.000.000,00		
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				15.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		0,00		19.000.000,00		

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	15.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	0	0,00	1	19.000.000,00		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				179.157.666,90		189.195.167,94		195.594.379,21		197.297.155,86		264.795.379,97		
Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	179.157.666,90	1	189.195.167,94	1	195.594.379,21	1	197.297.155,86	1	264.795.379,97		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	46	20		25		35		40		60			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.157.666,90		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.157.666,90	1	9.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		65.000.000,00		66.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	66.000.000,00	1	67.000.000,00	1	67.000.000,00		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				55.000.000,00		57.195.167,94		58.000.000,00		58.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	55.000.000,00	1	57.195.167,94	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.210.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	6.000.000,00	2	6.500.000,00	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00	2	7.210.000,00		

2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		51.500.000,00		54.594.379,21		55.297.155,86		120.585.379,97		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	46	20	50.000.000,00	25	51.500.000,00	35	54.594.379,21	40	55.297.155,86	60	120.585.379,97		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				137.000.000,00		141.700.000,00		150.000.000,00		252.650.000,00		257.229.500,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	7	137.000.000,00	8	141.700.000,00	8	150.000.000,00	9	252.650.000,00	9	257.229.500,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6		7		7		9		9			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		1		1			
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000,00		41.200.000,00		45.000.000,00		46.000.000,00		47.380.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	7	40.000.000,00	8	41.200.000,00	8	45.000.000,00	9	46.000.000,00	9	47.380.000,00		
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				47.000.000,00		48.500.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		51.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	6	47.000.000,00	7	48.500.000,00	7	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	51.500.000,00		
2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		58.349.500,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	50.000.000,00	4	52.000.000,00	4	55.000.000,00	4	56.650.000,00	4	58.349.500,00		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.000.000,00		244.110.000,00		258.500.000,00		258.500.000,00		266.255.000,00		

Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 4	1 4	237.000.000,00	1 4	244.110.000,00	1 4	258.500.000,00	1 4	258.500.000,00	1 4	266.255.000,00		
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		8.240.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.755.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.240.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.755.000,00		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				229.000.000,00		235.870.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		257.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	229.000.000,00	4	235.870.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	257.500.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				340.000.000,00		351.000.000,00		363.000.000,00		363.000.000,00		373.890.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	340.000.000,00	5	351.000.000,00	5	363.000.000,00	5	363.000.000,00	5	373.890.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	10		10		10		10		10			
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,00		257.500.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		272.950.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	10	250.000.000,00	10	257.500.000,00	10	265.000.000,00	10	265.000.000,00	10	272.950.000,00		

2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		41.500.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		44.290.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	40.000.000,00	5	41.500.000,00	5	43.000.000,00	5	43.000.000,00	5	44.290.000,00		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		52.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		56.650.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	56.650.000,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.020.139.950,00		1.049.174.688,99		1.079.109.385,58		1.109.948.676,76		1.141.715.133,45		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	69,65	70,03	1.020.139.950,00	70,58	1.049.174.688,99	70,97	1.079.109.385,58	71,36	1.109.948.676,76	71,36	1.141.715.133,45	2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				623.648.950,00		619.174.688,99		659.109.385,58		670.948.676,76		682.715.133,45		
Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	3	623.648.950,00	3	619.174.688,99	4	659.109.385,58	4	670.948.676,76	4	682.715.133,45		
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	0	500		500		500		500		500			
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	32.880	34.524		36.250		38.062		39.965		39.965			
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	0	20		20		20		20		20			

	(Perpustakaan)													
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	80		0		80		80		80			
	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	20	5		5		5		5		5			
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	88.636	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	20		20		20		20		20			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				62.440.400,00		73.689.200,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	20	62.440.400,00	20	73.689.200,00	20	73.000.000,00	20	73.000.000,00	20	73.000.000,00		

2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				43.221.600,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1	1	43.221.600,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				67.318.000,00		70.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	2	3	67.318.000,00	3	70.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				62.440.400,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0	20	62.440.400,00	20	65.000.000,00	20	65.000.000,00	20	65.000.000,00	20	65.000.000,00		
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				33.078.750,00		35.000.000,00		35.700.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	32.880	34.524	33.078.750,00	36.250	35.000.000,00	38.062	35.700.000,00	39.965	38.000.000,00	39.965	38.000.000,00		
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	20	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				71.059.100,00		0,00		60.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40	80	71.059.100,00	0	0,00	80	60.000.000,00	80	62.000.000,00	80	62.000.000,00	
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				43.750.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	0	4	43.750.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	47.000.000,00	4	47.000.000,00	
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				112.740.096,00		150.485.488,99		137.109.385,58		140.648.676,76		152.415.133,45	
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	88.636	2.000	112.740.096,00	2.000	150.485.488,99	2.000	137.109.385,58	2.000	140.648.676,76	2.000	152.415.133,45	
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				61.218.104,00		65.000.000,00		66.300.000,00		67.300.000,00		67.300.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	0	500	61.218.104,00	500	65.000.000,00	500	66.300.000,00	500	67.300.000,00	500	67.300.000,00	
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				46.382.500,00		50.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1	1	46.382.500,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	53.000.000,00	1	53.000.000,00	
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				396.491.000,00		430.000.000,00		420.000.000,00		439.000.000,00		459.000.000,00	
Meningkatnya Minat baca melalui pengembangan literasi masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	0	3	396.491.000,00	3	430.000.000,00	3	420.000.000,00	3	439.000.000,00	3	459.000.000,00	

	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	0	28		28		28		28		28		
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	70	20		20		20		20		20		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	42	84		84		84		84		84		
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				119.368.000,00		125.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00	
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	0	28	119.368.000,00	28	125.000.000,00	28	120.000.000,00	28	125.000.000,00	28	135.000.000,00	
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				59.371.200,00		70.000.000,00		70.000.000,00		72.000.000,00		72.000.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	70	20	59.371.200,00	20	70.000.000,00	20	70.000.000,00	20	72.000.000,00	20	72.000.000,00	
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00	

Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	0	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.000.000,00	1	52.000.000,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				118.465.000,00		125.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	42	84	118.465.000,00	84	125.000.000,00	84	120.000.000,00	84	125.000.000,00	84	135.000.000,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				54.286.800,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	0	3	54.286.800,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				156.191.950,00		157.791.258,61		159.440.139,21		161.138.847,22		162.888.625,91		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	25	100	156.191.950,00	100	157.791.258,61	100	159.440.139,21	100	161.138.847,22	100	162.888.625,91	2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				57.000.000,00		58.000.000,00		59.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	100	60	57.000.000,00	60	58.000.000,00	60	59.000.000,00	60	60.000.000,00	60	60.000.000,00		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				57.000.000,00		58.000.000,00		59.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	100	60	57.000.000,00	60	58.000.000,00	60	59.000.000,00	60	60.000.000,00	60	60.000.000,00		

2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				99.191.950,00		99.791.258,61		100.440.139,21		101.138.847,22		102.888.625,91		
Meningkatnya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	500	99.191.950,00	500	99.791.258,61	500	100.440.139,21	500	101.138.847,22	500	102.888.625,91		
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	500		500		500		500		500			
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				74.191.950,00		74.791.258,61		75.440.139,21		76.138.847,22		77.888.625,91		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	500	74.191.950,00	500	74.791.258,61	500	75.440.139,21	500	76.138.847,22	500	77.888.625,91		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00	500	25.000.000,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				280.520.000,00		282.811.722,02		285.174.478,00		287.608.633,94		290.115.971,39		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				228.520.000,00		229.331.722,70		230.168.605,47		231.030.777,94		231.918.871,14		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	52,50	57,50	228.520.000,00	87,50	229.331.722,70	100	230.168.605,47	100	231.030.777,94	100	231.918.871,14	2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				144.850.000,00		128.940.000,00		122.940.000,00		122.940.000,00		122.940.000,00		

Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	7	144.850.000,00	7	128.940.000,00	7	122.940.000,00	7	122.940.000,00	7	122.940.000,00		
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	250	250		250		250		250		250			
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	7.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	44	40		40		40		40		40			
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	0	0		5		5		5		5			
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				7.970.000,00		7.970.000,00		7.970.000,00		7.970.000,00		7.970.000,00		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	7.000	1.000	7.970.000,00	1.000	7.970.000,00	1.000	7.970.000,00	1.000	7.970.000,00	1.000	7.970.000,00		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				34.880.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	250	250	34.880.000,00	250	27.000.000,00	250	27.000.000,00	250	27.000.000,00	250	27.000.000,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				58.000.000,00		50.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	44	40	58.000.000,00	40	50.000.000,00	40	47.000.000,00	40	47.000.000,00	40	47.000.000,00		
2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				0,00		8.970.000,00		8.970.000,00		8.970.000,00		8.970.000,00		
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan (Laporan)	0	0	0,00	5	8.970.000,00	5	8.970.000,00	5	8.970.000,00	5	8.970.000,00		

2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota				44.000.000,00		35.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	7	44.000.000,00	7	35.000.000,00	7	32.000.000,00	7	32.000.000,00	7	32.000.000,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				0,00		40.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00		58.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	0	0	0,00	0	40.000.000,00	1	57.000.000,00	1	58.000.000,00	1	58.000.000,00		
	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	82.635	0		50		70		80		100			
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				0,00		40.000.000,00		37.000.000,00		38.000.000,00		38.000.000,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	82.635	0	0,00	50	40.000.000,00	70	37.000.000,00	80	38.000.000,00	100	38.000.000,00		
2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				83.670.000,00		60.391.722,70		50.228.605,47		50.090.777,94		50.978.871,14		
Jumlah Simpul Jaringan dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Infomasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	83.670.000,00	12	60.391.722,70	12	50.228.605,47	12	50.090.777,94	12	50.978.871,14		
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	4		4		4		4		4			

	Melalui JIKN (Pengguna)												
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				23.670.000,00		22.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0	4	23.670.000,00	4	22.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		38.391.722,70		30.228.605,47		30.090.777,94		30.978.871,14	
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	60.000.000,00	12	38.391.722,70	12	30.228.605,47	12	30.090.777,94	12	30.978.871,14	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				52.000.000,00		53.479.999,32		55.005.872,53		56.577.856,00		58.197.100,25	
Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	50	50	52.000.000,00	66,67	53.479.999,32	88,89	55.005.872,53	100	56.577.856,00	100	58.197.100,25	2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				32.000.000,00		25.000.000,00		13.000.000,00		11.500.000,00		13.000.000,00	
Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	12.608	1.000	32.000.000,00	1.000	25.000.000,00	1.000	13.000.000,00	1.000	11.500.000,00	1.000	13.000.000,00	
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				32.000.000,00		25.000.000,00		13.000.000,00		11.500.000,00		13.000.000,00	
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang	12.608	1.000	32.000.000,00	1.000	25.000.000,00	1.000	13.000.000,00	1.000	11.500.000,00	1.000	13.000.000,00	

Bawah 10 Tahun	Dimusnahkan (Berkas)													
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				0,00		0,00		20.000.000,00		26.000.000,00		26.000.000,00		
Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	500	20.000.000,00	500	26.000.000,00	500	26.000.000,00		
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	0	0		0		0		500		500			
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	0	0		0		1		1		1			
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	0	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat				0,00		0,00		10.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		

Daerah Kabupaten/Kota														
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	500	10.000.000,00	500	9.000.000,00	500	9.000.000,00		
2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				0,00		0,00		0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	500	8.000.000,00	500	8.000.000,00		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				20.000.000,00		28.479.999,32		22.005.872,53		19.077.856,00		19.197.100,25		
Terlaksananya jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	5.014	2.500	20.000.000,00	2.500	28.479.999,32	2.500	22.005.872,53	2.500	19.077.856,00	2.500	19.197.100,25		
	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	0	0		500		500		500		500			
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		12.000.000,00		10.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	0	0	0,00	500	12.000.000,00	500	10.000.000,00	500	9.000.000,00	500	9.000.000,00		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan				20.000.000,00		16.479.999,32		12.005.872,53		10.077.856,00		10.197.100,25		

Keabsahan Arsip														
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	5.014	2.500	20.000.000,00	2.500	16.479.999,32	2.500	12.005.872,53	2.500	10.077.856,00	2.500	10.197.100,25		

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

4.5 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
1.	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	

			2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	
			2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
			2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
			2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
3.	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
			2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
			2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
4.	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
			2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
			2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.01.0009 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
			2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	
			2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
			2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
			2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
			2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
			2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	

			2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
			2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Resntra

4.6 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan ukuran sebuah keberhasilan yang digunakan Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak untuk menilai pencapaian tujuan strategis efektifitas, dan kualitas kinerja. Adapun yang menjadi Ikator Kinerja utama pada dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak disajikan pada table berikut:

INDIKATOR K INERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	**2.23.2.24.0.00.23.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**									
2.	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	33,00	33,00	51,00	66,75	83,00	100,00	100,00	
3.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	69,86	10,85	14,00	18,00	23,00	28.00	31.00	
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	69,65	69,65	70,03	70,58	70,97	71,36	71,36	
5.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	73,70	73,70	75,30	77,90	78,70	80,30	80,30	
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	79,60	80,00	81,50	82,80	83,50	83,70	83,70	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD

4.7 Indikator Kinerja Kunci

INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										
2.	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	positif	%	69,65	69,65	70,03	70,58	70,97	71,36	71,36	
3.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	positif	Persentase	25	50	100	100	100	100	100	
4.	Indeks pembangunan literasi masyarakat		Indeks	69,31	69,86	70,41	70,96	71,51	72,06	72,61	
5.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Nilai	69,65	69,65	70,03	70,58	70,97	71,36	71,36	
6.	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										
7.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	positif	Persentase	50	50	50	66,67	88,89	100	100	
8.	Tingkat Ketersediaan Arsip	positif	Persentase	52,50	35	57,50	87,50	100	100	100	
9.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Angka	79,60	80,00	81,50	82,80	83,50	83,70	83,70	
10.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		Indeks	73,70	73,70	75,30	77,90	78,70	80,30	80,30	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD

Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

No.	Kategori (IKU/ IKK)	Nama Indikator	Rumus	Definisi
1	IKU	Tingkat Ketersediaan Arsip	T = (a+i+s+j) / 4	T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persenta sejumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN
2	IKU	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	TGM= (0.3FM + 0.3DM + 0.3JB) + (0.05 FAI + 0.05 DAI)	kajian dengan mengukur 5 parameter yaitu 1. Frekuensi membaca per minggu (kali); 2.Durasi/intensitas membaca dalam sehari (jam); 3.Banyaknya bahan bacaan yang telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul); 4.Frekuensi Akses Internet; dan
3	IKU	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan = 60% ASKE+40% ASKI	

4	IKU	Indeks pembangunan literasi Masyarakat	Indeks RealScore: Indeks_Real_0_100 = 100 × (0,30×dim_kepatuhan + 0,70×dim_kinerja)	1. Pengelompokan Dimensi: •dim_kepatuhan = rata-rata(sub_koleksi, sub_sdm) •dim_kinerja = rata-rata (sub_pelayanan, sub_pengelolaan) 2. Bobot: • Kepatuhan 0,30 • Kinerja 0,70
5	IKU	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat daerah

Tabel 4.6 Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak

BAB V
P E N U T U P

Perubahan paradigma pembangunan nasional dari kebijakan dan wewenang yang dikendalikan secara terpusat (sentralisasi) ke pemberian wewenang kepada kepala daerah Kabupaten/Kota untuk mengendalikan kegiatan pembangunan secara otonomi (desentralisasi), telah memberikan harapan yang besar kepada setiap daerah Kabupaten/Kota untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat, dengan tetap memperhatikan aspek persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan pembangunan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak telah berupaya untuk melaksanakan pembangunan, dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada di daerah. Salah satu wujud dari upaya dimaksud adalah dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

Pada dasarnya Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewajiban wajib, disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Oleh karenanya Rencana Strategis ini merupakan hasil kesepakatan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dengan stafnya.

Sukses tidaknya kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak baik dalam memberikan informasi maupun berupa sumbangan pemikiran (*sharing* pendapat).

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini mendapatkan manfaat bagi pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ke depan, implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak saja, melainkan juga semua *stakeholder* yang ada dilingkungan Kabupaten Siak.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan *responsive* terhadap perkembangan tehadap situasi yang sangat dinamis baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya maka secara periode perlu diupayakan untuk dilakukan perubahan baik secara parsial maupun menyeluruh.

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

SIGN HERE